Undang-Undang ITE Harus Berikan Rasa Keadilan

Rabu, 17 Februari 2021

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, dan produktif. Namun, implementasi UU ITE harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan terhadap penegakan UU ITE agar berjalan secara konsisten, akuntabel, dan adil.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa banyak laporan yang menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum, namun proses hukumnya kurang adil. Beliau meminta Kapolri untuk lebih selektif dalam menerima laporan dan menginstruksikan untuk menerjemahkan pasal-pasal yang multitafsir secara hati-hati.

Presiden juga meminta agar dibuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE untuk menghindari penafsiran sepihak. Jika UU ITE dianggap tidak adil, Presiden akan meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut, khususnya menghapus pasal-pasal karet yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, hal ini harus dilakukan melalui implementasi UU ITE yang adil dan sesuai dengan tujuannya.

Permintaan Presiden ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa aturan hukum di ruang digital tidak hanya melindungi kepentingan yang lebih luas, tetapi juga menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.